

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov.SulSel

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011, yang mengatur Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan yaitu :

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Kedudukan : Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pendukung tugas kepala daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok : Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan dan menyusun kebijakan daerah dibidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas Pembantuan

- Fungsi** : 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi Perencanaan dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
- 2) Penyelenggaraan dan Pelatihan meliputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Pendidikan dan Pelatihan Struktural
- 3) Pembinaan dan Penyelenggaraan tugas dibidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
- 4) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

1). Kepala Badan :

Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi perencanaan dan pengembangan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Struktural.
- b) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan meliputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural.

- c) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural.
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Rincian tupoksi :

- a) Menyusun rencana kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan, untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Mampu mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- g) Menetapkan kebijakan operasional Badan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah;
- h) Menetapkan Program kerja dan rencana strategis serta pengembangan program Pendidikan dan Pelatihan di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;
- i) Menetapkan kebijakan fasilitasi dan kerjasama/kemitraan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kediklatan;
- j) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dengan instansi terkait;
- k) Menyelenggarakan pembinaan administrasi kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi administrasi kepegawaiaan, keuangan, perlengkapan/umum.

- l) Memberi saran perkembangan dan rekomendasi teknis kepada gubernur mengenai pengembangan SDM Aparatur sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;
- m) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan dan memberikan saran perkembangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- n) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya.

2). Sekretariat

Tugas Pokok dan Fungsi:

Melaksanakan sebagian tugas badan dalam dan mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkup Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan.

Rincian Tupoksi :

- a) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
- b) Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c) Pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e) Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3). Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Tugas Pokok dan Fungsi :

Melaksanakan tugas badan di bidang perencanaan, pengembangan dan penyediaan publikasi program kediklatan.

Rincian Tupoksi :

- a) Perumusan dan penyiapan kebijakan operasional perencanaan, pengembangan dan penyediaan publikasi program-program kediklatan.
- b) Penyusunan pedoman, standarisasi, dan pelaksanaan akreditasi program-program kediklatan.
- c) Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan program-program kediklatan.
- d) Penyusunan dan penyiapan program pengembangan kompetensi pejabat struktural dan fungsional badan.
- e) Penyusunan dan penyiapan publikasi program-program kediklatan.
- f) Pelaksanaan Fasilitasi dan kerjasama/kemitraan program-program kediklatan dalam dan luar negeri.
- g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4). Bidang Diklat Teknis

Tugas Pokok dan Fungsi :

Melaksanakan tugas badan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.

Rincian Tupoksi :

- a) Perumusan dan penyiapan kebijakan operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis;
- b) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan teknis umum pendidikan dan pelatihan teknis substantif;
- c) Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan teknis di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d) Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

5). Bidang Diklat Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi :

Melaksanakan tugas badan di bidang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan fungsional;

Rincian Tupoksi :

- a) Perumusan dan penyiapan kebijakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan fungsional;
- b) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan fungsional umum dan pendidikan dan Pelatihan fungsional berjenjang;
- c) Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan fungsional di Provinsi dan kabupaten/Kota;
- d) Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai di bidang tugasnya.

6). Bidang Diklat Struktural

Tugas Pokok dan Fungsi :

Melaksanakan tugas badan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural.

Rincian Tupoksi :

- a) Perumusan dan penyiapan kebijakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan struktural;
- b) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan prajabatan dan Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan;
- c) Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan prajabatan dan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di Provinsi dan kabupaten/Kota;
- d) Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan di bidang tugasnya.

7). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Tugas Pokok dan Fungsi :

- a) UPTB mempunyai sebagian tugas melaksanakan Tugas badan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pendidikan dan Pelatihan dibidang Pengembangan Media Pembelajaran, dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan tugas pokok merencanakan, menganalisis, mengembangkan dan melaksanakan program kajian dan pengembangan serta operasionalisasi Media Pembelajaran (MP);
- b) Memberikan perkembangan teknis kepada Badan tentang kebijakan pengembangan dan pendayagunaan operasional Media Pembelajaran.

Rincian Tupoksi :

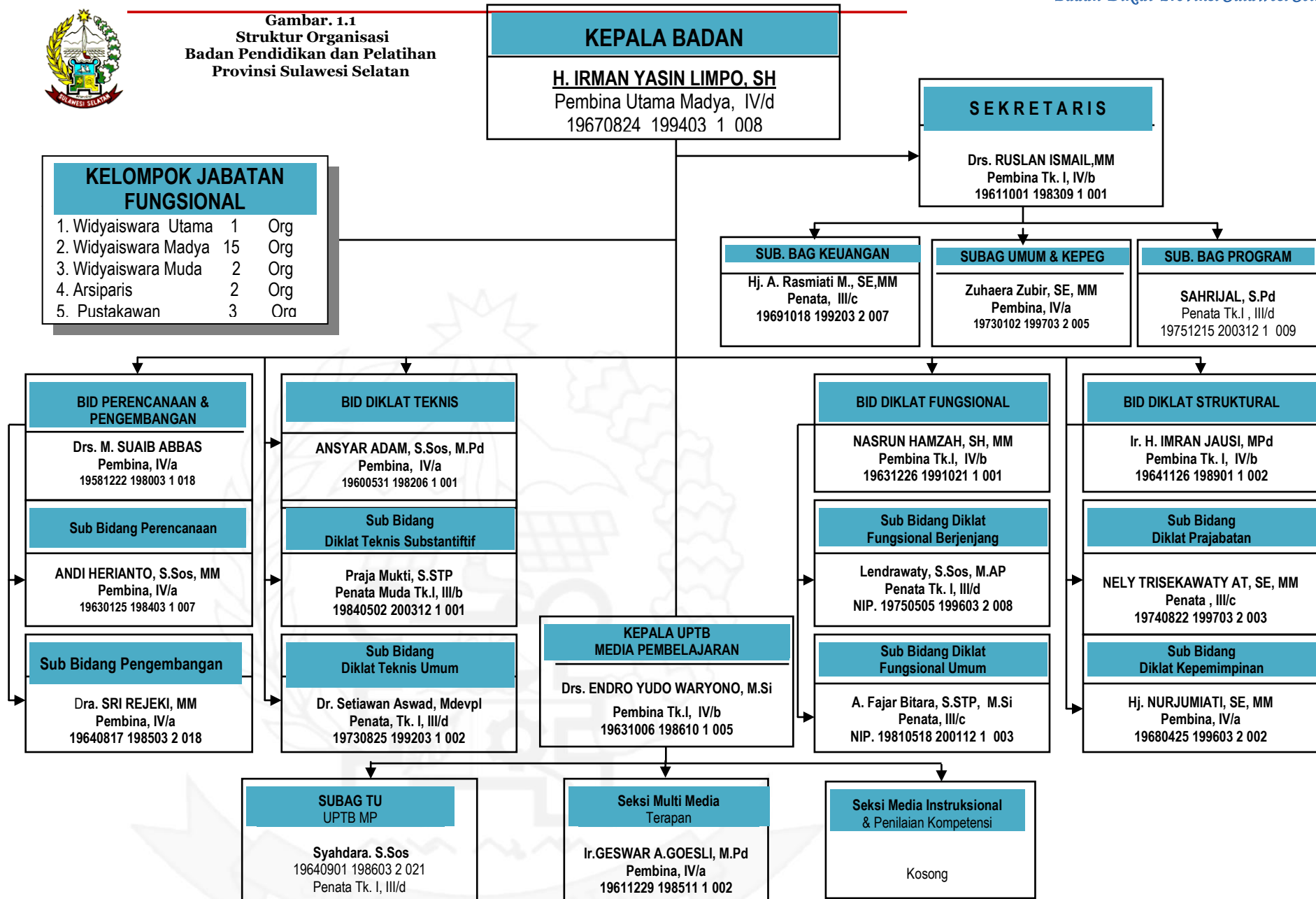
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan operasional pengelolaan media pembelajaran
- b) Penyediaan dan pengelolaan laboratorium komputer, laboratorium bahasa, laboratorium micro teaching, assesment center, perpustakaan dan media pembelajaran lainnya;
- c) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai di bidang tugasnya.

2. Struktur Organisasi

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki struktur organisasi sesuai gambar berikut :



Gambar. 1.1
Struktur Organisasi
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Sulawesi Selatan



3. SDM Aparatur Badan Diklat Prov. SulSel

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh adanya sumber daya manusia yakni sumber daya aparatur yang berkualitas sebagai penggerak roda organisasi yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi

a. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki PNS Sebanyak 113 Orang keadaan Desember 2015, tersebar di Sekretariat, di 4 (empat) Bidang dan di UPTB MP. dengan kualifikasi pendidikan yang bervariasi sebagai berikut : Program Doktoral (S3) 5 orang atau sekitar 4,42%, Pascasarjana (S2) sebanyak 37 orang atau sekitar 32,74%, berkualifikasi Sarjana (S1) sebanyak 53 orang atau sekitar 46,90%, berkualifikasi sarjana muda (D3) sebanyak 4 orang atau sekitar 3,58% dan sebanyak 13 orang atau 11,50% yang berkualifikasi SLTA kebawah.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai Badan Diklat
Menurut Jenis kelamin Tahun 2015

No	Unit Kerja	Pria	Wanita	Jumlah
1	Sekretariat	26	11	37
2	Bid. Renbang	5	7	12
3	Bid. Diklat Struktural	6	5	11
4	Bid. Diklat Fungsional	3	7	10
5	Bid. Diklat Teknis	8	5	13
6	UPTB MP	8	4	12

Sedangkan mengenai pembinaan dan pemberdayaan PNS yang ada pada Badan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan melalui pendayagunaan dengan mendistribusikan kedalam bidang-bidang/unit kerja organisasi. Distribusi PNS menurut Bidang dan Sekretariat dapat diuraikan secara kuantitatif baik PNS laki-laki maupun perempuan pada daftar terlampir.

Didalam mendistribusikan PNS tentunya banyak variable yang mempengaruhi yakni persyaratan formal diantaranya kesesuaian kompetensi PNS

dengan jabatan yang tersedia, namun secara kenyataannya selama ini sulit dicapai disemua lini pemerintahan karena berbagai normative yang ada tidak saling terkait secara berjenjang sehingga perlu adanya regulasi secara pasti mengenai jenis dan jenjang kompetensi jabatan yang terkait dengan jenis dan jenjang pendidikan dan diklat yang dipersyaratkan.

Distribusi Jumlah PNS menurut Pendidikan dan Golongan, jenis kelamin serta Widyaiswara/tenaga pengajar, dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Diklat Prov.SulSel
Menurut Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin
Keadaan 31 Desember 2015

No	Menurut Golongan/Ruang	Unit Kerja																Jumlah Total	
		Kepala Badan		Sekretariat		Bidang Renbang		UPTB		Bidang Diklat Teknis		Bidang Diklat Fungsional		Bidang Diklat Struktural		Widyaiswara /Fungsional			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gol. II	-	-	2	1	2	1	3	-	1	1	1	-	3	-	-	-	-	15
	a	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	5
	b	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	8
	c	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Gol. III	-	-	19	8	1	5	3	3	5	4	1	7	2	4	2	-	-	64
	a	-	-	8	2	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	15
	b	-	-	7	3	-	3	-	1	1	2	-	1	1	2	-	-	-	21
	c	-	-	2	2	-	-	2	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	12
	d	-	-	2	1	1	-	-	2	2	1	-	5	-	-	2	-	-	16
4	Gol. IV	1	-	4	2	2	1	2	1	1	-	1	-	1	1	11	5	-	33
	a	-	-	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	13
	b	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	4	-	14
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4
	d	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	-	25	11	5	7	8	4	8	5	3	7	6	5	13	5	113	

Tabel 1.3

**DATA JUMLAH TINGKAT ESELON DAN PEJABAT MENURUT JENIS KELAMIN PADA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN KEADAAN 31 DESEMBER 2015**

No	Jabatan				JUMLAH Job Pegawai												Jumlah (8+11+14+17)	Ket
	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Widyaiswara				
					P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	-	1	6	14	1	-	1	6	-	6	5	9	14	12	5	16	38	

Tabel 1.4

**DATA JUMLAH TENAGA PENGAJAR / WIDYAISWARA TETAP MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEADAAN DESEMBER 2015**

No	Tingkat Golongan	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Keterangan
		SM/D III	S1	S2	S3	Pria	Wanita	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Golongan III							
	A	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	
	C	-	-	-	-	-	-	
	D	-	1	-	-	1	-	Widyaiswara Muda 3 orang
2	Golongan IV							
	A	-	1	3	1	4	1	Widyaiswara Madya 13 orang
	B	-	1	5	1	4	3	
	C	-	-	3	-	2	1	
	D	-	-	-	1	1	-	Widyaiswara Utama 1 orang
	E	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		3	11	3	12	5	

B. FUNGSI STRATEGIS BADAN DIKLAT PROV. SULSEL

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Diklat Prov. SulSel serta mengacu pada misi dan nilai-nilai pencapaian visi, maka strategi yang dipilih adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pengembangan diklat yang berbasis kompetensi
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis sistem Teknologi Informasi (TI)
3. Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder
4. Penyelenggaraan diklat sesuai dengan regulasi kediklatan dan taat aturan jejaring kerja dengan stakeholder

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI BADAN DIKLAT PROV. SULSEL

Adapun permasalahan utama berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan saat ini adalah sebagai berikut :

1. Kelembagaan Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Umum dan Pembangunan SDM Negara belum memperlihatkan kinerja yang optimal, hal ini yang menjadi variabel antara lain dalam pelayanan publik menunjukkan tingkat kualitas pemberian pelayanan SDM belum seiring dengan tuntutan kualitas yang diharapkan masyarakat, sehingga terkesan aparatur dalam memberikan pelayanan kapasitasnya belum memadai untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan langkah konkrit untuk meningkatkan kompetensi kapasitas aparatur melalui berbagai program kediklatan.
2. Lingkungan strategis pemerintahan mengalami perkembangan secara dinamis dan cepat yang berdimensi global dan nasional serta kompleksitas struktur sosial, sehingga kelembagaan pemerintah daerah harus responship terhadap perkembangan yang terjadi, begitu pula keberadaan SDM pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kompetensinya seiring dan seirama dengan perkembangan kemajuan yang terjadi dari waktu

kewaktu. Kapasitas kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan diklat selama ini mungkin tidak memadai lagi dalam menghadapi perubahan tata nilai pergaulan global dan nasional yang begitu cepat dan kompleks, sehingga dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, untuk itu kebutuhan Pendidikan dan pelatihan setiap aparatur perlu dilakukan secara dinamis sesuai tuntutan perkembangan lingkungan strategis pemerintahan.

3. Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang teakreditasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selalu memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan kediklatan secara profesionalisme, sehingga perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang dipersyaratkan. Diakui bahwa kondisi sarana dan prasarana yang tersedia masih belum memadai utamanya pada saat pelaksanaan kegiatan kediklatan yang bersamaan / paralel, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, untuk itu upaya yang dilakukan dengan mengusulkan secara bertahap pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan / perbaikan sarana dan prasarana yang ada agar dapat dipertahankan dan difungsikan sesuai peruntukannya.
4. Secara umum alokasi anggaran masih kurang di beberapa kegiatan prioritas sementara objek kegiatan yang akan ditangani masih sangat banyak jumlahnya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana strategis sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun. Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional dan lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran dari tahun 2013-2018. Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan, Program Pembangunan daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2013-2018 yang bersifat indikatif.

V I S I

Visi Sulawesi Selatan tahun 2013 - 2018 adalah *” Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi pada Tahun 2018 ”*.

Dengan mencermati perkembangan dan perubahan lingkungan strategi terhadap pembangunan Sulawesi Selatan maka ditetapkan visi yang mendukung visi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Terdepan Dalam Inovasi Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi

M I S I

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan diklat berbasis kompetensi.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis teknologi informasi
3. Memperluas jejaring kerja dengan stakeholder
4. Mewujudkan komitmen terhadap regulasi kediklatan

T U J U A N

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi, yang merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya tujuan organisasi maka dapat diketahui dengan jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai lima tahun ke depan.

Tujuan Pembangunan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan Misi untuk mencapai Visi yaitu :

1. Menghasilkan perencanaan diklat yang berbasis kompetensi
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis Teknologi Informasi (TI)
3. Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder
4. Menghasilkan penyelenggaraan diklat sesuai dengan regulasi kediklatan dan taat aturan jejaring kerja dengan stakeholder

S A S A R A N

Sasaran Pembangunan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

1. Tersusunnya perencanaan dan program diklat berbasis kompetensi
2. Terselenggaranya diklat berbasis SMM dan Teknologi Informasi
3. Terlaksananya kerjasama sinergis dengan stakeholder
4. Terlaksananya penyelenggaraan diklat sesuai regulasi dan taat aturan

KEBIJAKAN

Kebijakan Pembangunan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan 2015 diarahkan kepada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan melalui jejaring kerjasama kediklatan
2. Peningkatan kualitas pelayanan kediklatan melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)

PROGRAM

Untuk melaksanakan Pembangunan Badan Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Selatan selama periode 2013-2018, maka ditetapkan program yang terkait erat dalam upaya pencapaian pembangunan di Sulawesi Selatan yaitu :

Terdapat 6 (Enam) Program Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahun Renstra (2013-2018), maka pada Tahun 2015 kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan untuk penyediaan sarana dan Prasarana Kediklatan, Pengembangan dan pembinaan personil, penatausahaan administrasi kantor, barang, keuangan, penyediaan dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran penyediaan system informasi manajemen kediklatan, kepegawaian dan keuangan serta pengelolaan multimedia pembelajaran dalam upaya peningkatan kapasitas dan integritas sebagai lembaga diklat yang terakreditasi sehingga dapat diwujudkan profesionalisme dan kemandirian Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam mengelola kediklatan sesuai standar yang dipersyaratkan, dan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja serta kesejahteraan pegawai Badan.

Adapun kegiatan yang direncanakan dalam program ini adalah :

- 1) Pelayanan Aparatur dan Kelembagaan
- 2) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 3) Peningkatan Pengelolaan Multimedia Terapan
- 4) Peningkatan Pengelolaan Media Instruksional dan Penilaian Kompetensi.

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Program ini diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan Sumberdaya Manusia, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kediklatan dalam upaya pemenuhan kelayakan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan sebagai lembaga diklat terakreditasi serta mantapnya sarana dan prasarana untuk dapat digunakan sesuai peruntukannya sehingga pelayanan kelembagaan dapat lebih berkualitas dan terpercaya sebagai lembaga pengelola kediklatan yang professional dan mandiri. Adapun kegiatan yang direncanakan dalam program ini meliputi :

- 1) Peningkatan Kapasitas Pengembangan SDM Aparatur
- 2) Pembinaan Administrasi Kepegawaian Badan Diklat.
- 3) Peningkatan Kinerja Pegawai Badan Diklat.
- 4) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- 5) Pemeliharaan Gedung Kantor, Asrama dan Peralatan Kantor.
- 6) Pemeliharaan Gedung Pusat Pelatihan Kepramugarian.

3. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

Program ini diarahkan untuk pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan terhadap seluruh program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, melalui peningkatan dan pengembangan system perencanaan dan sistem evaluasi kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan melakukan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang direncanakan dalam program ini terdiri dari dari :

- 1) Peningkatan Perencanaan Program Kinerja Badan.
- 2) Pengelolaan dan Penatausahaan Administrasi Keuangan.
- 3) Penyusunan Dokumen Keuangan Badan.
- 4) Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan.
- 5) Penyusunan Lasporan Kinerja Badan Diklat.
- 6) Penyusunan LAKIP dan LPPD Badan Diklat.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Penyusunan kegiatan program ini dilaksanakan dengan mengacu pada kesesuaian antara jenis program diklat dengan kebutuhan obyektif dan riil dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja pemerintah daerah serta sesuai dengan prinsip pengembangan organisasi modern. Selain itu program ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan kegiatan program diklat yang dipersiapkan bagi pejabat struktural, fungsional dan kemampuan teknis pada jenjang organisasi pemerintahan di propinsi sampai di Desa/Kelurahan sesuai Amanat PP No. 79 Tahun 2005. Dengan adanya kesesuaian ini diharapkan diklat akan dapat meningkatkan kompetensi SDM Aparatur yang memberikan kontribusi lebih besar dalam perbaikan kinerja dan produktivitas aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya jenis program diklat yang dikembangkan tersebut dikategorikan kedalam beberapa rumpun diklat yaitu diklat teknis, diklat fungsional, dan diklat kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan.
- 2) Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis.
- 3) Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional
- 4) Pelaksanaan Pelatihan/Workshop/Kursus-Kursus singkat.
- 5) Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk.III & IV Kab/Kota se SulSel.
- 6) Koordinasi, Pembinaan & Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis Lingkup Pemprov dan Kab/Kota

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Kegiatan Program ini diarahkan untuk mengantisipasi dinamika perubahan manajemen kediklatan yang selama ini cenderung tersentralisasi menjadi lebih terdesentralisasi sebagai implikasi dari berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 menyebabkan bergesernya orientasi penyelenggaraan diklat baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Jika mengacu kepada filosofi dan esensi dari UU tersebut maka pada akhirnya tingkat muara kewenangan

pemerintah akan lebih banyak berada di daerah termasuk di bidang pendidikan dan latihan sehingga pemerintah provinsi mempunyai peran yang signifikan dalam proses aliran kewenangan tersebut. Kewenangan dibidang diklat yang belum atau tidak dilaksanakan oleh kabupaten/kota karena keterbatasan sumberdaya, akan menjadi kewenangan provinsi (sebagai fungsi fasilitasi) disamping kewenangan untuk melaksanakan diklat yang mempunyai muatan kompetensi wawasan kebangsaan.

Kondisi ini akan mengakibatkan pergeseran pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang selama ini lebih berorientasi pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (training delivery). Pengembangan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan (Training Development). Orientasi kearah pengembangan program ini menghendaki adanya upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk melakukan kajian dan pengembangan berbagai jenis dan kurikulum program diklat beserta desain instruksional dan modul pembelajaran, termasuk diklat spesifik/local, sesuai dengan analisis kebutuhan diklat (training need analisis) dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur yang relevan dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan memperhatikan Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan pelatihan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Disamping itu perlunya kerjasama/kolaborasi yang sinergi dengan berbagai pihak antara lain perguruan tinggi, LSM ataupun komponen masyarakat lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam pelaksanaan maupun pengembangan program kediklatan utamanya dalam menetapkan program diklat baru berbasis kompetensi yang berorientasi/dapat mengatasi permasalahan kinerja yang dihadapi pada tingkat pemerintahan/unit kerja daerah dengan merumuskan kompetensi yang tidak/kurang dikuasai yang dijadikan dasar untuk pengembangan system pembelajaran dan rumusan tujuan diklat secara tentatif. Sementara itu untuk menciptakan tolak ukur yang sama sesuai tingkat

kemampuan dan karakteristik daerah dalam penyelenggaraan program- program kediklatan, maka diperlukan upaya - upaya standarisasi, analisis serta monitoring dan evaluasi kediklatan, agar standar kualitas hasil pelaksanaan diklat tetap dapat terjaga sesuai dengan norma dan standar penyelenggaraan diklat secara umum dan dapat diterapkan secara praktis dilapangan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini terdiri dari :

- 1) Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kediklatan.
 - 2) Analisa Kebutuhan Diklat (AKD)
 - 3) Fasilitasi dan Kerjasama Program Kediklatan.
 - 4) Promosi dan Publikasi Kediklatan.
 - 5) Monitoring dan Evaluasi Kediklatan.
 - 6) Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Kab/Kota.
 - 7) Penyusunan Desain dan Pengembangan Modul Pembelajaran Diklat
6. Program Peningkatan Kapasitas Profesionalitas SDM.

Program Kegiatan ini mengacu pada program prioritas pemerintah propinsi sul sel dalam peningkatan sumber daya manusia agar dapat memiliki kompetensi, kapasitas dan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan. Adapun kegiatan dalam program ini adalah :

- 1) Pelatihan Kepramugarian.

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 mempunyai komitmen kinerja yang terdiri dari sasaran, indikator dan target tahun 2015. Target ditetapkan untuk indikator kinerja, baik indikator kinerja tingkat

sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (*input, output, outcome*). Perjanjian kinerja tahun 2015 dijabarkan sebagai berikut

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan
Prov. Sul-Sel TA. 2015

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi	Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi	85%
		Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus	65%
2	Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia	Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan Memuaskan	67%
		Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan	85%
		Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian	90%
		Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian	90%
		Persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat MoT dan ToC	67%
3	Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder	Jumlah kerjasama DIKLAT dengan stakeholder	25 MOU/PKS/KSO
4	Terwujudnya diklat sesuai regulasi	Persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina	80

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Pendidikan dan Pelatihan
Prov. Sul-Sel TA. 2015

No.	Indikator	Target
1	Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan	85%
2	Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian	90%
3	Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian	90%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan pengukuran kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015 yang telah disepakati. Pengukuran ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori	Keterangan
1	$90.1 \leq$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	$75.1 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$65.1 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$50.1 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

(sumber : Permendagri 54 / 2010)

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan periode 2013-2018. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015.

Pelaksanaan program/kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2015 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah

dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi	Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi (%)	85	87	102.35
		Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus (%)	65	63	96.92
		Rata-rata Capaian Sasaran 1	99.64		
2	Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia	Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan Memuaskan(%)	67	30.07	44.88
		Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan (%)	85	99.86	117.48
		Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian (%)	90	99.62	110.69
		Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian (%)	90	100	111.11
		Persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat MoT dan ToC (%)	67	52.63	78.55
		Rata-rata Capaian Sasaran 2	92.54		
3	Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder	Jumlah kerjasama DIKLAT dengan stakeholder (MoU/PKS/KSO)	25	25	100
4	Terwujudnya diklat sesuai regulasi	Persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina (%)	80	77	96.25
		Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2015	97.11		

Pada tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa dari keempat sasaran tersebut rata-rata tingkat capaian kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2015 adalah sebesar 97,11% dengan uraian sebagai berikut :

1) Sasaran 1: Meningkatkan kualitas diklat yang berbasis kompetensi

Pada sasaran meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi dan Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standar kurikulum/silabus. Indikator kinerja Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi tahun 2015 terealisasi sebesar 87% dari target yang ditetapkan sebesar 85% sehingga capaian kinerja sebesar 102,35%, sedangkan indikator kinerja Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standar kurikulum/silabus tahun 2015 terealisasi sebanyak 63% dari target yang ditetapkan yaitu 65% sehingga capaian kinerja sebesar 96,92%. Sehingga rata-rata capaian kinerja dari Sasaran 1 adalah sebesar 99,64%, artinya upaya peningkatan kualitas diklat berbasis kompetensi telah dilaksanakan dengan kinerja yang baik.

2) Sasaran 2: Meningkatkan kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia

Sasaran meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 92,54%, artinya pelaksanaan kegiatan yang menunjang capaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan kinerja yang baik. Uraian setiap indikator sebagai berikut:

- Indikator kinerja Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan Memuaskan tahun 2015 terealisasi sebesar 30,07% atau 316 orang dari 1.051 orang peserta diklat pada tahun 2015, sehingga capaian kinerja hanya sebesar 44,88% dari target yang ditetapkan sebesar 67%, artinya target yang ditetapkan tidak tercapai.
- Indikator kinerja Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat prajabatan tahun 2015 terealisasi sebesar 99,86% atau 700 orang dari jumlah CPNS Pemprov. Sulawesi Selatan tahun 2015 yaitu sebanyak 701 orang sehingga capaian kinerja mencapai 107,48% dari target yang ditetapkan yaitu 85%, artinya capaian kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan;

- Indikator kinerja Persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus ujian tahun 2015 terealisasi sebesar 99,62% atau 262 orang dari 263 orang peserta diklat kepemimpinan tahun 2015, sehingga capaian kinerja sebesar 110,69% dari target yang ditetapkan sebesar 90%;
- Indikator kinerja Persentase peserta diklat fungsional yang lulus ujian tahun 2015 terealisasi sebesar 100% atau 88 orang dari 88 orang peserta diklat fungsional tahun 2015, sehingga capaian kinerja sebesar 111,11% dari target yang ditetapkan sebesar 90%;
- Sedangkan untuk indikator sasaran Persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat MoT dan ToC, Jumlah Pejabat Struktural di Badan Diklat pada Tahun 2015 sebanyak 20 orang dan yang mempunyai sertifikat MOT sebanyak 19 orang, sedangkan Jumlah Staf sebanyak 75 orang dan yang mempunyai sertifikat TOC sebanyak 31 orang, sehingga total yang mempunyai sertifikat MOT dan TOC sebanyak 50 orang atau sebesar 52,63% dari jumlah total Pejabat dan Staf sebanyak 95 orang. Capaian kinerja Tahun 2015 sebesar 78,55% dari target yang ditetapkan sebesar 67%.

3) Sasaran 3: Terwujudnya kerjasama yang sinergis dengan stakeholder

Sasaran Terwujudnya kerjasama yang sinergis dengan stakeholder didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah kerjasama diklat dengan stakeholder. Pada tahun 2015 Indikator kinerja Jumlah kerjasama diklat dengan stakeholder tahun 2015 terealisasi sebesar 25 PKS/MoU/KSO dari target yang ditetapkan sebesar 25 PKS/MoU/KSO sehingga capaian kinerja sebesar 100%, artinya upaya peningkatan jumlah kerjasama diklat dengan stakeholder berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.

4) Sasaran 4: Terwujudnya diklat sesuai regulasi

Sasaran 4 Terwujudnya diklat sesuai regulasi didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina. Pada tahun 2015 Indikator kinerja persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi

akreditasi instansi pembina terealisasi sebesar 77% dari target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga capaian kinerja sebesar 96,25%, artinya pelaksanaan kegiatan yang menunjang capaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan kinerja yang baik.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2015

No.	Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Kenaikan/ Penurunan) Rata-rata
1	Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi	Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi (%)	85	87	2.35
		Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus (%)	57	63	10.53
		Rata-rata kenaikan Realisasi Kinerja Sasaran 1			6.44
2	Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia	Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan Memuaskan(%)	41.68	30.07	-27.86
		Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan (%)	70.74	99.86	41.16
		Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian (%)	99.83	99.62	-0.21
		Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian (%)	100	100	0.00
		Persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat MoT dan ToC (%)	58.14	52.63	-9.48
		Rata-rata kenaikan Realisasi Kinerja Sasaran 2			0.72
3	Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder	Jumlah kerjasama DIKLAT dengan stakeholder (MoU/PKS/KSO)	22	25	13.64
4	Terwujudnya diklat sesuai regulasi	Persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina (%)	75	77	2.67
Rata-rata kenaikan Realisasi Kinerja dari Tahun 2014 ke tahun 2015					5.87

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2014 dengan Tahun 2015 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,87%, dengan uraian setiap sasaran dijelaskan sebagai berikut :

1) Sasaran 1: Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi

- a. Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi.

Realisasi kinerja Indikator Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi Tahun 2015 (87%) lebih besar dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2014 (85%). Perkembangan Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi dari tahun 2014 sampai tahun 2015 meningkat sebanyak 2,35% dan diharapkan kondisi ini akan terus ditingkatkan sehingga dapat mencapai target Renstra di tahun 2018.

- b. Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus

Realisasi Kinerja Indikator Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standar kurikulum/silabus Tahun 2015 (63%) lebih besar dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 (57%). Perkembangan Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standar kurikulum/silabus dari tahun 2014 sampai tahun 2015 meningkat sebanyak 10,53%, dan diharapkan kondisi ini akan terus ditingkatkan sehingga dapat mencapai target Renstra di tahun 2018.

2) Sasaran 2: Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia

- a. Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan Memuaskan

Realisasi Kinerja Indikator Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan Memuaskan Tahun 2015 (30,07%) lebih kecil dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 (41,68%).

Perkembangan Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan Memuaskan dari tahun 2014 sampai tahun 2015 menurun sebanyak 27,86%.

b. Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan

Realisasi Kinerja Indikator Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat prajabatan Tahun 2015 (99,86%) lebih besar dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 (70,74%). Perkembangan Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat prajabatan dari tahun 2014 sampai tahun 2015 meningkat sangat signifikan sebanyak 41,16%, dan diharapkan kondisi ini akan terus ditingkatkan sehingga dapat mencapai target Renstra di tahun 2018.

c. Persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus ujian

Realisasi Kinerja Indikator Persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus ujian Tahun 2015 (99,62%) lebih kecil dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 (99,83%). Perkembangan Persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus ujian dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 0,21%.

d. Persentase peserta diklat fungsional yang lulus ujian

Realisasi Kinerja Indikator Persentase peserta diklat fungsional yang lulus ujian Tahun 2015 (100%) sama dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 (100%) Perkembangan Persentase peserta diklat fungsional yang lulus ujian dari tahun 2014 sampai tahun 2015 tetap konstan%, dan diharapkan kondisi ini akan terus ditingkatkan sehingga dapat mencapai target Renstra di tahun 2018.

e. Persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat MoT dan ToC

Realisasi Kinerja Indikator Persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat MoT dan ToC Tahun 2015 (58,14%) lebih kecil dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 (52,63%). Persentase

penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat MoT dan ToC dari tahun 2014 sampai tahun 2015 menurun sebanyak 9,48%.

3) Sasaran 3: Terwujudnya kerjasama yang sinergis dengan stakeholder

Realisasi Kinerja Indikator Jumlah kerjasama diklat dengan stakeholder Tahun 2015 (25 MoU/PKS/KSO) lebih besar dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 (22 MoU/PKS/KSO). Perkembangan Jumlah kerjasama diklat dengan stakeholder dari tahun 2014 sampai tahun 2015 meningkat 13,64%, dan diharapkan kondisi ini akan terus ditingkatkan sehingga dapat mencapai target Renstra di tahun 2018.

4) Sasaran 4: Terwujudnya diklat sesuai regulasi

Realisasi kinerja Indikator Persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina Tahun 2015 (77%) lebih besar dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 (75%). Perkembangan Persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina dari tahun 2014 sampai tahun 2015 meningkat 2,67%, dan diharapkan kondisi ini akan terus ditingkatkan sehingga dapat mencapai target Renstra di tahun 2018.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan Target Kinerja Renstra (2018)

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015
dan Target Kinerja Renstra (2018)

No.	Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2015	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2015 terhadap Renstra
1	Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi	Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi (%)	87	95	91.58
		Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus (%)	63	80	78.75
		Rata-rata Capaian Sasaran 1 terhadap Renstra			85.16
2	Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia	Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan Memuaskan(%)	30.07	80	37.59
		Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan (%)	99.86	95	105.12
		Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian (%)	99.62	100	99.62
		Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian (%)	100	100	100.00
		Persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat MoT dan ToC (%)	52.63	80	65.79
		Rata-rata Capaian Sasaran 2 terhadap Renstra			81.62
3	Terwujudnya kerjasama yang sinergis dengan stakeholder	Jumlah kerjasama DIKLAT dengan stakeholder (MoU/PKS/KSO)	25	28	89.29
4	Terwujudnya diklat sesuai regulasi	Persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina (%)	77	90	85.56
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2015 Terhadap Renstra (2018)					85.41

Berdasarkan tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi kinerja tahun 2015 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra sudah tercapai sebesar 85,41% dari target akhir renstra.

1) Sasaran 1: Meningkatkan kualitas diklat yang berbasis kompetensi

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian realisasi Tahun 2015 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra sudah tercapai rata-rata dari 2 indikator sebesar 85,16%. Untuk indikator persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi yang terealisasi sebesar 87% sudah tercapai 91,58% dari target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 95%. Sedangkan indikator Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standar kurikulum/silabus yang terealisasi 65% sudah tercapai 78,75% dari target akhir Renstra yang ditetapkan sebanyak 80%.

2) Sasaran 2: Meningkatkan kapasitas profesionalitas sumber daya manusia

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kapasitas profesionalitas sumber daya manusia dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian realisasi Tahun 2015 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra sudah tercapai rata-rata dari 5 indikator sebesar 82,86%. Untuk indikator persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan memuaskan yang terealisasi sebesar 30,07% sudah tercapai 37,59% dari target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 80%. Indikator persentase CPNS yang telah mengikuti diklat prajabatan yang terealisasi sebesar 99,86% sudah tercapai 105,12% dari target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 95%. Indikator persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus ujian yang terealisasi sebesar 99,62% sudah tercapai 99,62% dari target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator persentase peserta diklat fungsional yang lulus ujian yang terealisasi sebesar 100% sudah tercapai 100% dari target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 100%. Sedangkan indikator persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat MOT dan TOC yang

terrealisasi 52,63% sudah tercapai 65,79% dari target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 80%.

3) Sasaran 3: Terwujudnya kerjasama yang sinergis dengan stakeholder

Realisasi kinerja sasaran terwujudnya kerjasama yang sinergis dengan stakeholder dengan indikator jumlah kerjasama diklat dengan stakeholder dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian realisasi Tahun 2015 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra sudah tercapai sebesar 89,29%.

4) Sasaran 4: Terwujudnya diklat sesuai regulasi

Realisasi kinerja sasaran terwujudnya diklat sesuai regulasi dengan indikator persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi Pembina yang terealisasi sebesar 77% dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian realisasi Tahun 2015 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra sudah tercapai sebesar 85,56% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1) Sasaran 1: Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi

Berdasarkan tabel 3.2, rata-rata capaian kinerja dari Sasaran 1 adalah sebesar 99,64%, artinya upaya peningkatan kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia telah dilaksanakan dengan kinerja yang baik. Dan dari tabel 3.3. dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi kinerja Sasaran 1 dari tahun 2014 sampai tahun 2015 meningkat 6,44%, dan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian realisasi Tahun 2015 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra sudah tercapai rata-rata dari 2 (dua) indikator sebesar 85,16% (tabel 3.4)

Berdasarkan tabel 3.1 skala pengukuran kinerja (Permendagri No.54 Tahun 2010) Pencapaian kinerja Sasaran 1 Tahun 2015 tergolong kategori Sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan antara lain yaitu (1)

adanya dukungan SDM yang kompeten dalam penyusunan kurikulum/silabus dan modul diklat yang berbasis kompetensi (competency based curriculum) dan (2) adanya kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyusunan kurikulum diklat

Walaupun capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja, antara lain : (1) belum tersusunnya standarisasi kompetensi jabatan sebagai dasar penyusunan kurikulum/silabus dan modul diklat, (2) tidak tentunya jadwal penyelesaian penyusunan modul, (3) bervariasinya faktor pengaruh pada setiap jenis diklat, sehingga diperlukan analisis yang tepat untuk menghasilkan petunjuk teknis yang sesuai.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, solusi yang telah dilakukan antara lain : (1) implementasi konsep penyusunan kurikulum diklat yang berbasis kompetensi, (2) monitoring terhadap jadwal penyusunan modul sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan tepat waktu, dan (3) mendasarkan petunjuk teknis sesuai siklus diklat yang meliputi analisis kebutuhan diklat, penetapan tujuan diklat, pengembangan desain pembelajaran, pelaksanaan diklat dan evaluasi diklat

2) Sasaran 2: Meningkatkan kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia

Berdasarkan tabel 3.2, rata-rata capaian kinerja dari Sasaran 2 adalah sebesar 92,54%, artinya upaya peningkatan kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia telah dilaksanakan dengan kinerja yang baik. Dan dari tabel 3.3. dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi kinerja Sasaran 2 dari tahun 2014 sampai tahun 2015 meningkat 0,72%, dan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian realisasi Tahun 2015 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra sudah tercapai rata-rata dari 2 (dua) indikator sebesar 81,62% (tabel 3.4)

Berdasarkan tabel 3.1 skala pengukuran kinerja (Permendagri No.54 Tahun 2010) Pencapaian kinerja Sasaran 1 Tahun 2015 tergolong kategori Sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan antara lain yaitu (1)

adanya dukungan Anggaran, (2) adanya dukungan sumberdaya manusia yang kompeten, dan (3) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Namun terkait capaian kinerja indikator Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan memuaskan hanya mencapai 44.88% dari target yang ditetapkan sebesar 67%, artinya target yang ditetapkan tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari peserta, khususnya peserta diklat prajabatan adalah kategori K2 dan K1 yang memiliki kemampuan lisan dan tulisan tergolong rendah, sehingga predikat kelulusan yang dicapai dibawah kategori memuaskan. Sedangkan capaian kinerja indikator Persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat MOT dan TOC yang hanya mencapai 78,55% dari target yang ditetapkan sebesar 67%, artinya capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan. Penyebab tidak maksimalnya pencapaian kinerja indikator ini adalah terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan diklat MOT dan TOC di Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov.SulSel.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, solusi yang telah dilakukan yaitu Penambahan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar. Dan solusi yang akan dilakukan yaitu Perencanaan anggaran untuk pelaksanaan diklat MOT dan TOC.

3) Sasaran 3: Terwujudnya kerjasama yang sinergis dengan stakeholder

Berdasarkan tabel 3.2, capaian kinerja dari Sasaran 3 adalah sebesar 100%, artinya upaya peningkatan jumlah kerjasama diklat dengan stakeholder telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan dari tabel 3.3. dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi kinerja Sasaran 3 dari tahun 2014 sampai tahun 2015 meningkat 13,64%, dan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian realisasi Tahun 2015 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra sudah tercapai sebesar 89,29% (tabel 3.4)

Berdasarkan tabel 3.1 skala pengukuran kinerja (Permendagri No.54 Tahun 2010) Pencapaian kinerja Sasaran 3 Tahun 2015 tergolong kategori Sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan antara lain

yaitu adanya pengakuan atau akreditasi dari Instansi pembina diklat (LAN - RI). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN-RI No. 2047/I/13/14/2010 tanggal 13 Desember 2010 maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Sulawesi Selatan telah terakreditasi untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Diklat Pim Tingkat III dan Diklat Pim Tingkat IV. Dengan demikian, Badan Diklat Prov. Sul - Sel sebagai institusi penyelenggara diklat aparatur/PNS berhak memfasilitasi penyelenggara diklat terutama untuk Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan yang institusi penyelenggara diklatnya belum terakreditasi. Dengan status ini hampir semua penyelenggaraan diklat di lingkup Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan telah difasilitasi oleh Badan Diklat Prov. Sul - Sel. Status lembaga terakreditasi ini juga bahkan telah berdampak pada semakin banyaknya jumlah pihak atau mitra kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi SDM terutama pendidikan dan pelatihan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghargaan dari PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Tokoh Pemerintah Pionir Pendidikan dan Pelatihan Kepramugarian kerjasama pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dengan pihak maskapai penerbangan Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (*Sumber : Media Surat Kabar Fajar Tanggal 8 Januari 2015.*)

Walaupun capaian pada sasaran 3 ini sudah optimal namun masih tetap ada beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja, antara lain : (1) Masih adanya lembaga diklat pusat/sektoral yang menyelenggarakan diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional; (2) Masih adanya persaingan lembaga diklat non pemerintah penyelenggara diklat teknis dan fungsional;, dan (3) Tuntutan terhadap kualitas pelayanan yang semakin tinggi.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, solusi yang telah dilakukan yaitu implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu di Provinsi Sulawesi Selatan

4) Sasaran 4: Terwujudnya diklat sesuai regulasi

Berdasarkan tabel 3.2, capaian kinerja dari Sasaran 4 adalah sebesar 96,25%, artinya upaya peningkatan penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi Pembina telah dilaksanakan dengan kinerja yang baik.

Dan dari tabel 3.3. dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi kinerja Sasaran 4 dari tahun 2014 sampai tahun 2015 meningkat 2,67%, dan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian realisasi Tahun 2015 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra sudah tercapai sebesar 85,56% (tabel 3.4)

Berdasarkan tabel 3.1 skala pengukuran kinerja (Permendagri No.54 Tahun 2010) Pencapaian kinerja Sasaran 4 Tahun 2015 tergolong kategori Sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan antara lain yaitu (1) adanya dukungan Anggaran, (2) adanya dukungan sumberdaya manusia yang kompeten, dan (3) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, solusi yang telah dilakukan yaitu Penerapan beberapa regulasi di bidang kediklatan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator	Capaian 2015	Realisasi Anggaran 2015	Efisiensi Sumber Daya
1	Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi	Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi (%)	102.35	91.53	8.10
		Jumlah jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus (jenis diklat)	96.92		
		Rata-rata Capaian Sasaran 1	99.64		
2	Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia	Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan Memuaskan(%)	44.88	88.98	3.56
		Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan (%)	117.48		
		Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian (%)	110.69		
		Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian (%)	111.11		
		Persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat MoT dan ToC (%)	78.55		
		Rata-rata Capaian Sasaran 2	92.54		
3	Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder	Jumlah kerjasama DIKLAT dengan stakeholder (MoU/PKS/KSO)	100	59.71	40.29
4	Terwujudnya diklat sesuai regulasi	Persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina (%)	96.25	88.98	7.27
Rata-rata Efisiensi terdapat Sumber Daya Tahun 2015					14.81

Berdasarkan tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa Rata-rata efisiensi pencapaian kinerja terhadap sumber daya (anggaran) mencapai 14,81%, dengan uraian setiap sasaran dijelaskan sebagai berikut :

1) Sasaran 1: Meningkatkan kualitas diklat yang berbasis kompetensi

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, rata-rata capaian kinerja pada sasaran 1 adalah 99,64%, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu sebesar Rp. 858.520.500,- atau 91,53% dari total pagu anggaran sebesar Rp.937.941.000,- terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,10% dari pagu yang ditentukan.

2) Sasaran 2: Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, rata-rata capaian kinerja pada sasaran 2 adalah 92,54%, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu sebesar Rp. 9.720.997.300,- atau 88,98% dari total pagu anggaran sebesar Rp.10.924.581.300,- terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,56% dari pagu yang ditentukan.

3) Sasaran 3: Terwujudnya kerjasama yang sinergis dengan stakeholder

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu sebesar Rp.1.012.102.600,- atau 59,71% dari total pagu anggaran sebesar Rp.1.695.127.400,- terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 40,29% dari pagu yang ditentukan.

4) Sasaran 4: Terwujudnya diklat sesuai regulasi

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, capaian kinerja pada sasaran ini adalah 96,25%, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu sebesar Rp. 9.720.997.300,- atau 88,98% dari total pagu anggaran sebesar Rp.10.924.581.300,- terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,27% dari pagu yang ditentukan.

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

1) Sasaran 1: Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi

Program dari sasaran ini adalah Program pembinaan dan pengembangan aparatur. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan dan mewujudkan upaya kreatif dan inovatif untuk melakukan kajian dan pengembangan berbagai jenis dan kurikulum program diklat beserta desain instruksional dan modul pembelajaran, termasuk diklat spesifik/lokal sesuai dengan analisis kebutuhan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya yang relevan dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik ditingkat pusat maupun di Kab./Kota. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi dengan capaian sebesar 102,35% dan persentase jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus dengan capaian 99,64%.

Adapun alokasi anggaran tahun 2015 untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp.937.941.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 858.520.500,- atau 91,53%, untuk pelaksanaan 5 kegiatan, yaitu :

1) Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kediklatan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2015 sebesar Rp.439.635.000,- dan realisasi sebesar Rp.408.176.500,- atau 92,84%, sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya kualitas penyelenggaraan diklat sesuai standar SMM 9001:2008.

2) Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2015 sebesar Rp.107.507.000,- dan realisasi sebesar Rp.101.958.300,- atau 94,84%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 97,59%. Serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam penyusunan AKD bagi aparat SKPD Prov.SulSel

3) Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Tahun 2015

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2015 sebesar Rp.119.213.000,- dan realisasi sebesar Rp.114.213.000,- atau 95,81%, dan realisasi fisik 99,33%. Serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian Tercapainya hasil monev. Bagi peserta diklat sebanyak 4 angkatan.

4) Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Kab./Kota Tahun 2015

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2015 sebesar Rp.188.728.000,- dan realisasi sebesar Rp. 180.493.000,- atau 95,64%, sedangkan realisasi fisik 100%.

5) Penyusunan Desain dan Pengembangan Modul Pembelajaran Diklat

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2015 sebesar Rp.82.858.000,- dan realisasi sebesar Rp. 53.679.700,- atau 64,79%, sedangkan realisasi fisik 74,79%

2) **Sasaran 2: Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi**

Program yang menunjang Pencapaian Kinerja dari sasaran ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Program ini bertujuan untuk menyeimbangkan kegiatan program diklat yang dipersiapkan bagi pejabat struktural, fungsional dan kemampuan teknis pada tingkat organisasi pemerintahan di Provinsi sampai di Desa/Kelurahan sesuai amanat PP Nomor 79 Tahun 2005. Penyusunan kegiatan program ini dilaksanakan dengan mengacu pada kesesuaian antara jenis program diklat dengan kebutuhan obyektif dan riil dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja pemerintahan serta sesuai dengan prinsip pengembangan organisasi modern. Dengan adanya kesesuaian ini diharapkan diklat akan dapat meningkatkan kompetensi SDM aparatur yang memberikan kontribusi lebih besar dalam perbaikan kinerja dan produktivitas aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya jenis program diklat yang dikembangkan tersebut dikategorikan ke dalam beberapa rumpun diklat yaitu Diklat Teknis, Diklat Fungsional, dan Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan.

Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 10.924.581.300,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 9.720.997.300,- atau sebesar 88,98%, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini :

1) Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.023.244.500,- dan terdapat realisasi penggunaan anggaran sampai 31 Desember 2015 sebesar Rp. 6.620.098.000,- atau 94,26% dan realisasi fisik 99,59% dan outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya tingkat kompetensi sesuai jenis/jenjang diklat yang dapat diperinci sebagai berikut : (1) Diklat Kepemimpinan Tk.IV sebanyak 5 angkatan /120 orang; (2) Diklat Kepemimpinan Tk.III sebanyak 7 angkatan / 143; (3) Diklat Prajabatan Gol. III sebanyak 7 angkatan / 227 orang ; (4) Diklat Prajabatan Gol. II&I sebanyak 2 angkatan / 73 orang

2) Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD 2015 sebesar Rp. 1.204.250.000,- dan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.111.434.700,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 92,29% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 97,78% dan outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya tingkat kompetensi sesuai jenis/jenjang diklat teknis 4 jenis diklat/5 angkatan dengan jumlah alumni 88 orang dari target 90 orang yang dapat diperinci sebagai berikut : (1) Diklat Manajemen Perpustakaan 20 orang; (2) Diklat Jabatan Fungsional Kebidanan 25 orang; (3) Diklat Calon Widyaiswara (RJU) 23 orang; (4) Diklat MOT 20 orang

3) Pelaksanaan Pelatihan/Workshop/Kursus-kursus Singkat

Telah dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 938.443.500,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.

564.490.000,- atau 60.15% dan realisasi fisik sebesar 83,25% dan outcome 100% dengan capaian tercapainya tingkat kompetensi tenaga pendidik sebanyak 489 orang dari target 2.000 orang

3) Sasaran 3: Terwujudnya kerjasama yang sinergis dengan stakeholder

Pada Sasaran 3 ini terdapat 3 (tiga) Program yang menunjang Pencapaian Kinerja dengan total anggaran sebesar Rp.1.695.127.400,- dengan realisasi sebesar Rp.1.012.102.600,- atau 59,71% .

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, yaitu pada kegiatan Fasilitasi dan Kerjasama Kediklatan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Terlaksananya fasilitasi dan kerjasama penyelenggaraan diklat baik dalam maupun luar negeri. Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2015 sebesar Rp.326.959.000,- dan realisasi sebesar Rp. 163.294.000,- atau 49,94% dan realisasi fisik sebesar 50,45%. Dan kegiatan Promosi dan Publikasi Kediklatan dengan indikator kinerja kegiatan tercapainya buletin inovasi Badan Diklat prov. SulSel, serta tercapainya sarana informasi kediklatan yang berkualitas mengenai eksistensi & kapabilitas badan diklat prov. Sul Sel baik untuk publik maupun kalangan internal. Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2015 sebesar Rp.124.750.000,- dan realisasi sebesar Rp. 124.700.000,- atau 99,96%, dan realisasi fisik 100%.
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Profesionalisme SDM kegiatan Pelatihan Kepramugarian dengan indikator kinerja kegiatan Tersedianya calon pramugari yang profesional. Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 929.663.400,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 449.432.280,- atau 48,34%, dan realisasi fisik sebesar 71,1%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan (1) Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk. III & IV kab/kota se sulsel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 215.415.820,- atau 86,17% dengan

capaian terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tk. IV sebanyak 1.129 orang / 34 angkatan pada 15 kab/kota se Sulawesi Selatan,. Dan (2) kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis Lingkup Pemprov & Kab/Kota sebanyak 22 angkatan / 873 orang pada 3 kabupaten di Sulawesi Selatan (Kab.Kep.Selayar, Luwu Timur, dan Wajo) dengan alokasi anggaran dalam sebesar Rp. 63.755.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 59.260.500,- atau 92,95%.

4) Sasaran 4: Terwujudnya diklat sesuai regulasi

Program yang menunjang Pencapaian Kinerja dari sasaran ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Indikator Kinerja dari program ini yaitu Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 10.924.581.300,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 9.720.997.300,- atau sebesar 88,98%, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini :

1) Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.023.244.500,- dan terdapat realisasi penggunaan anggaran sampai 31 Desember 2015 sebesar Rp. 6.620.098.000,- atau 94,26% dan realisasi fisik 99,59% dan outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya tingkat kompetensi sesuai jenis/jenjang diklat yang dapat diperinci sebagai berikut : (1) Diklat Kepemimpinan Tk.IV sebanyak 5 angkatan /120 orang; (2) Diklat Kepemimpinan Tk.III sebanyak 7 angkatan / 143; (3) Diklat Prajabatan Gol. III sebanyak 7 angkatan / 227 orang ; (4) Diklat Prajabatan Gol. II&I sebanyak 2 angkatan / 73 orang

2) Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD 2015 sebesar Rp. 1.204.250.000,- dan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.111.434.700,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 92,29% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 97,78% dan

outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya tingkat kompetensi sesuai jenis/jenjang diklat teknis 4 jenis diklat/5 angkatan dengan jumlah alumni 88 orang dari target 90 orang yang dapat diperinci sebagai berikut : (1) Diklat Manajemen Perpustakaan 20 orang; (2) Diklat Jabatan Fungsional Kebidanan 25 orang; (3) Diklat Calon Widyaiswara (RJU) 23 orang; (4) Diklat MOT 20 orang

3) Pelaksanaan Pelatihan/Workshop/Kursus-kursus Singkat

Telah dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 938.443.500,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 564.490.000,- atau 60.15% dan realisasi fisik sebesar 83,25% dan outcome 100% dengan capaian tercapainya tingkat kompetensi tenaga pendidik sebanyak 489 orang dari target 2.000 orang

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015

a. Pendapatan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, mempunyai total target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 11.412.191.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.766.591.100,- (94,34%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	U R A I A N	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen-tase (%)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD)	656,371,100	820,601,100	125.02
2	Retribusi Jasa Pendidikan (RJU)	10,755,820,000	9,945,990,000	92.47
JUMLAH ANGGARAN		11,412,191,100	10,766,591,100	94.34

b. Belanja

Untuk tahun 2015 ini, total alokasi belanja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 38.106.420.423,- dan total realisasi sebanyak Rp. 34.907.007.157,- (91,60%), dan realisasi fisik 95,77 % yang terdiri dari:

1) Belanja Tidak Langsung

Total alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rp.9.173.775.797,- dengan realisasi Rp.9.028.511.504,- (98,42%), dan realisasi fisik 99,20%.

2) Belanja Langsung

Alokasi anggaran untuk belanja langsung Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rp. 28.932.644.626,- dengan realisasi Rp. 25.878.495.653,- (89,44%) dengan realisasi fisik 95,51%.

Gambaran anggaran dan realisasi anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan yang bersumber pada anggaran APBD TA. 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan TA. 2015

No	U R A I A N	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen- tase (%)	Sisa Anggaran (Rp)
A.	BELANJA TIDAK LANSUNG	9,173,775,797	9,028,511,504	98.42	145,264,293
1.	Caji dan Tunjangan	6,427,561,055	6,321,855,414	98.36	105,705,641
2.	Tambahan Penghasilan PNS	2,488,924,742	2,454,546,090	98.62	34,378,652
3.	Insentif Pungutan Retribusi Daerah	257,290,000	252,110,000	97.99	5,180,000
B.	BELANJA LANGSUNG	28,932,644,626	25,878,495,653	89.44	3,054,148,973
1.	Belanja Pegawai	2,244,620,000	2,015,591,000	89.80	229,029,000
2.	Belanja Barang dan Jasa	22,694,466,826	20,628,159,953	90.90	2,066,306,873
3.	Belanja Modal	3,993,557,800	3,234,744,700	81.00	758,813,100
JUMLAH ANGGARAN		38,106,420,423	34,907,007,157	91.60	3,199,413,266

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BADAN DIKLAT, 31 Des. 2015

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2015 dengan mengacu pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan yang komprehensif, sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan serta sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Pemerintah Daerah dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pencapaian kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan pada 4 (empat) sasaran tergolong kategori "Sangat Tinggi" (Permendagri No. 54 Tahun 2010). Rata-rata tingkat capaian kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2015 adalah sebesar 97,11%.
- b. Perbandingan realisasi kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2014 dengan Tahun 2015 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,87%.
- c. Realisasi kinerja tahun 2015 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra sudah tercapai rata-rata sebesar 85,41% dari target akhir renstra.
- d. Rata-rata efisiensi pencapaian kinerja terhadap sumber daya (anggaran) mencapai 14,81%,

- e. Realisasi anggaran dana APBD tahun 2015 yaitu realisasi keuangan sebesar 91,60% dan realisasi fisik 95,77%.

B. Rekomendasi

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan melakukan perencanaan yang baik
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan lebih cermat serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya
 - b. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses kegiatan diklat baik tenaga pengajar maupun penyelenggara.
 - c. Perencanaan diklat yang akurat melalui kegiatan perencanaan kebutuhan diklat yang dibutuhkan oleh stakeholder
 - d. Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Renstra 2013-2018 perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan agar hasil yang dicapai secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, termasuk optimalisasi manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, Februari 2016

KEPALA BADAN,

H. IRMAN YASIN LIMPO, SH

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19670824 199403 1 008